



# Accountability Brief

Tim Penulis:  
Helmizar  
Achmad Yugo Pidhegso  
Mochammad Ramadhan

## Problem Teknis dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Palapa Ring

### 1. Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan semangat Pancasila sila Ketiga “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, pemerintah memiliki program khusus untuk memberikan keadilan berupa pemerataan jaringan internet di seluruh pelosok Indonesia melalui program Palapa Ring. Semangat ini dituangkan pada salah satu dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar..

Program Palapa Ring dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tepatnya pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang dimulai pada tahun 2016 dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Palapa Ring dibagi menjadi 3 Paket yaitu sebagai berikut:

Gambar. Pembagian Paket Wilayah Palapa Ring



Sumber: Rencana Strategis Kominfo 2020 - 2024

Pelaksanaan program strategis dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak tentunya patut mendapatkan perhatian dari seluruh pihak. Sedikitnya terdapat 2 permasalahan yang dapat menjadi perhatian, yaitu isu keamanan dalam Palapa Ring Timur dan temuan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kominfo Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

### 2. Kendala Teknis Pelaksanaan Palapa Ring

Mekanisme KPBU dalam pelaksanaan Palapa Ring memiliki konsekuensi bahwa program ini harus menarik investor. Namun pada kenyataannya terdapat permasalahan keamanan dalam pelaksanaan Palapa Ring khususnya pada Palapa Ring Timur. Salah satunya adalah adanya 174 kasus vandalisme BTS Palapa Ring dari tahun 2019 – 2021. Vandalisme yang

2022

Komisi I

terjadi adalah perusakan optic, pembakaran perangkat, hingga ancaman terhadap para pekerja proyek Palapa Ring Timur. Keadaan ini menyebabkan timbulnya kerugian pihak pelaksana hingga ratusan miliar rupiah. Pihak penyedia saat ini telah melakukan langkah-langkah preventif yaitu dengan memasang CCTV dan pagar listrik.

Tidak hanya isu keamanan, akses menuju titik pembangunan juga menjadi kendala. Hal ini diungkap oleh Pemeriksa BPK RI pada saat diskusi antara Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan BPK RI tentang IHPS I 2021. Dijelaskan bahwa terdapat kesulitan akses menuju lokasi pembangunan tower dimana hal ini tentunya menimbulkan biaya tambahan bagi pihak pelaksana.

### 3. Permasalahan dalam LHP atas LK Kominfo TA 2020

Pengadaan jasa konsultansi *Project Management Unit* (PMU) Palapa Ring menimbulkan adanya pemborosan keuangan negara sebesar Rp309.608.697 atas perbedaan hari antara laporan dengan kenyataan, biaya penyusunan draf laporan akhir dan biaya non personel yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Serta menimbulkan adanya kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp11.855.197.

Pada pelaksanaan proyek Palapa Ring Barat, terdapat klausul-klausul dalam PKS dengan PT PRB yang tidak selaras atau bertentangan satu dengan lainnya dimana hal ini menimbulkan risiko adanya sengketa hukum di masa mendatang. Serta terdapat denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp14.377.839.410.

Terkait dengan capaian *Service Level Agreement* (SLA) yang menjadi dasar pembayaran *Availability Payment* (AP) kepada penyedia, terdapat permasalahan yaitu pada pembuktian parameter capaian SLA. Sebenarnya hal ini sudah menjadi temuan pada LK TA 2019 dengan rekomendasi pemasangan perangkat dan modul monitoring dan utilisasi, namun rekomendasi tersebut belum dilaksanakan. Hal ini memiliki risiko data yang digunakan untuk pembayaran AP tidak sesuai dengan kenyataan dan berpotensi disalahgunakan.

### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Komisi I DPR RI perlu untuk memberikan perhatian dengan mendorong sinergi antara Kominfo dengan TNI untuk menjaga keamanan pada titik-titik pembangunan tower, serta mendorong adanya pendekatan terhadap warga sekitar dalam usaha untuk menjaga keamanan lokasi pembangunan tower, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk dapat memperbaiki infrastruktur agar akses menuju lokasi pembangunan tower dipermudah, serta mendorong Kominfo untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

### 5. Referensi

BPK RI. 2020 & 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 & 2020. Jakarta.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020. Jakarta.

CNN Indonesia. 2021. 174 Kasus Vandalisme BTS Palapa Ring di Papua dari 2019-2021. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210120192625-213-596340/174-kasus-vandalisme-bts-palapa-ring-di-papua-dari-2019-2021> pada 1 Februari 2022.

Bisnis.com. 2021. Marak Aksi Vandalisme, Pengelola Palapa Ring Timur Minta Jaminan Keamanan. Diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20210129/101/1349589/marak-aksi-vandalisme-pengelola-palapa-ring-timur-minta-jaminan-keamanan> pada 1 Februari 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024. Jakarta.

2022

Komisi I